

# Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis

ISSN: 2337-6112

(The Indonesian Journal of Management and Accounting)

Vol. 8 | No.2

## PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

Taufiqurrohman\* Ita Puspita\*\*

\* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

\*\* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

### Article Info

#### Keywords:

Regional Financial Management Information System, Guidance Financial Technical and Quality of Government Financial Reports Area

### Abstract

*This study aims to analyze the effect of the Regional Financial Management Information System and Financial Technical Guidance on the Quality of the Lebak Regency Regional Government Financial Statements for the period 2012-2016. Because of an increase in opinion from the Financial Supervisory Agency from the previous year. This is an interesting phenomenon that occurs in Lebak Regency.*

*The method of research conducted by the author is a quantitative method. Respondents in this study were all financial administration officials (PPK), expenditure treasurers, revenue treasurers and regional financial management information system operators in 30 regional organizations at the level of Agency / Service in Lebak Regency, amounting to 99 respondents. Data retrieval is done by using a sample non probability sampling in the form of purposive sampling. Data obtained 94 respondents from 99 questionnaires distributed. The data obtained were analyzed using the SPSS version 22.0 program. Data analysis techniques used to test the hypothesis using the Classic Assumption Test formula, Multiple Linear Regression Analysis, Correlation Coefficient, Determination, Regression Coefficient Test together (f test) and Partial Regression Coefficient Test (t test).*

*The results of data analysis obtained from 94 respondents, obtained values in the equation  $Y = 1.711 + 0.213X_1 + 0.715X_2$  and adjusted R square ( $R^2$ ) of 0.843 or 84% of the variables  $X_1$  and  $X_2$ . From the description above, it can be concluded that the Regional Financial Management Information System and Financial Technical Guidance influence and significantly affect the Quality of Local Government Financial Reports in Lebak Regency.*

### Corresponding Author:

Taufiqurrahman@yahoo.com

itapuspita@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bimbingan Teknis Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada periode 2012-2016. Karena mengalami peningkatan opini dari Badan Pengawas Keuangan dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi fenomena menarik yang terjadi di Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh

pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan operator sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada 30 organisasi perangkat daerah setingkat Badan/Dinas di Kabupaten Lebak yang berjumlah 99 responden. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan sampel cara non probability sampling berupa purposive sampling. Data diperoleh 94 responden dari 99 kuesioner yang disebarkan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 22.0. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesisnya menggunakan rumus Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien Korelasi, Determinasi, Uji Koefisien Regresi Bersama-sama (uji f) dan Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (uji t).

Hasil dari analisis data yang diperoleh dari 94 responden, diperoleh nilai dalam persamaan  $Y = 1,711 + 0,213X_1 + 0,715X_2$  dan Adjusted R square ( $R^2$ ) sebesar 0,843 atau 84% dari variable  $X_1$  dan  $X_2$ . Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bimbingan Teknis Keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak.

©2020 JSAB. All rights reserved.

## Pendahuluan

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009).

Sejak tahun 2003, reformasi keuangan pada sektor publik di Indonesia telah dimulai (Sutrisno, 2018). Hal tersebut ditandai dengan lahirnya undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara yaitu: Undang-Undang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003), Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004), dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004)

Laporan Keuangan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus disusun dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan keuangan yang telah diaudit BPK, selanjutnya disampaikan ke DPR/DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD (Haryanto dkk, 2007).

Komponen laporan keuangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dan pengungkapan komponen laporan tersebut di atas, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Pada dasarnya pemerintah daerah berupaya menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penting reformasi akuntansi dan

administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Sutrisno, 2018). Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: (1) relevan, artinya informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu; (2) andal, artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; (3) dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; (4) dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kualitas pelaporan keuangan mulai dari tingkat terkecil yaitu perangkat daerah/SKPD Pemerintah Daerah dan Satuan kerja/Satker Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada masing-masing kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap perangkat daerah harus dapat menyajikan laporan keuangan secara cepat, akurat dan lengkap yang memenuhi prasyarat normatif sebagai wujud akuntabilitas.

Dalam penelitian ini akan fokus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun setiap tahun dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Apabila BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (John dan Setiawan, 2009).

Hasil pemeriksaan atas seluruh (542) LKPD Tahun 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 378 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 141 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 (4%) LKPD seperti terlihat dalam Grafik 1.1. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 275 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%) (IHPS BPK, 2017).

Pemerintah Kabupaten Lebak dalam penyusunan Laporan Keuangan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagai sebuah konsekuensi logis dari amanah yang dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, untuk lebih memperjelas secara teknis dari amanat Peraturan Perundang-undangan diatas Pemerintah Kabupaten Lebak menerbitkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Fenomena peningkatan kualitas laporan keuangan tersebut menjadi fenomena menarik dalam penelitian ini karena pada realitasnya permasalahan kualitas laporan keuangan masih dapat menjadi penghalang terciptanya pelaporan keuangan yang memadai. Penelitian terkait kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah mendapatkan perhatian cukup

signifikan. Perbedaan penelitian yang satu dengan yang lain terletak pada variabel bebas (*independent*) yang digunakan, lokasi dan tempat penelitian, serta populasi dan sampel penelitian.

## **Landasan Teori**

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit – unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga – lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak – hak publik. Menurut (Mardiasmo, 2009 : 20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menerucut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah juga diatur dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam peraturan bupati ini mengatur dasar – dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur pula dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2014 tentang Akuntansi Pemerintah Daerah Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

### **Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Salah satu teknologi dan sistem informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Dampak atas dilberlakukannya undang – undang otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Terkait dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, menyampaikan bahwa informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, kecermatan, ketepatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang meliputi proses penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Sistem ini diimplementasikan dengan harapan untuk menciptakan efektivitas kerja serta meningkatkan dalam mengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lebak. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di daerahnya masing – masing.

SIPKD merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Maka Kementrian Dalam Negeri membuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sehingga dapat mempercepat dalam proses pengelolaan keuangan Daerah kaarena sistemnya yang terintegrasi.

### **Bimbingan Teknis Keuangan**

Dalam proses Manajemen Sumber Daya Manusia ada suatu usaha untuk memelihara, meningkatkan kemampuan, kapasitas maupun profesionalisme pegawai. Proses tersebut disebut dengan pengembangan pegawai. Menurut (Sulistiyani dan Rosidah : 2009 : 219) Pelatihan adalah proses sistematis pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan – tujuan organisasional. Pelatihan dan pengembangan penting karena keduanya merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara, pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktifitasnya. Pelatihan biasanya dimulai dengan orientasi yakni suatu proses dimana para pegawai diberi informasi dan pengetahuan

tentang kepegawaian, organisasi dan harapan – harapan untuk mencapai *performance* tertentu. Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan dimana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap dan keahlian, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pegawai. Disamping itu pelatihan diberikan instruksi untuk mengembangkan keahlian – keahlian yang dapat langsung terpakai pada pegawai, dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada jabatan yang didudukinya sekarang. Perbedaan pelatihan dengan pengembangan (Simamora dalam Sulistyani, Rosidah : 2009 : 220) menjelaskan bahwa pelatihan (*training*) diarahkan untuk membantu karyawan menunaikan kepegawaian mereka saat ini secara lebih baik; sedangkan pengembangan (*development*) adalah mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri pegawai. Pelatihan mempunyai focus yang agak sempit dan harus memberikan keahlian – keahlian yang bakal memberikan manfaat bagi organisasi secara cepat. Pengembangan didasarkan pada kenyataan bahwa seorang pegawai akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dan suksesi posisi yang ditemui selama karirnya.

Pelatihan teknis atau bimbingan teknis yang dimaksud disini yaitu memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/ masalah yang bersifat teknis yang mana melakukan pekerjaan yang akan lebih bertanggung jawab serta dapat membina hubungan kerja sama dan dapat membuka diri. Ini merupakan petunjuk teknis dari Mendagri Nomor SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 yang berbunyi Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

### **Hubungan antar variabel**

Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan pemerintah daerah harus merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Didalamnya terdapat karakteristik kualitatif laporan pemerintah daerah yakni : relatif, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Oleh Karena itu sistem informasi pengelolaan dibutuhkan agar tercapainya suatu laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah yang tujuannya agar laporan keuangan dapat dibuat dengan cepat dan tepat. Disamping itu, harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, sehingga perlu diadakan nya bimbingan/ pelatihan teknis keuangan guna menciptakan keselarasan sehingga dapat tercipta nya laporan keuangan yang berkualitas.

### **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang dipilih adalah metode survey dengan tujuan menggeneralisasi populasi dari sampel yang telah ditentukan untuk dibuat kesimpulan-kesimpulan sementara mengenai karakteristik-karakteristik, perilaku-perilaku, atau sikap-sikap dari populasi.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan operator SIPKD pada 30 organisasi perangkat daerah setingkat Badan/Dinas di Kabupaten Lebak, Banten berjumlah 90 orang. Pemilihan PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan dan Operator SIPKD sebagai populasi dalam penelitian ini karena mereka terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Metode penentuan sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu nonprobability sampling berupa purposive sampling “ adalah metode pengambilan sampel

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Jenis dan sumber data informasi berasal dari kuesioner sebagai data primer, diperkuat dengan data empiris lainnya berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, penelitian terdahulu, dan website BPK.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan kuesioner. Menurut sugiyono, (2013 : 199) “kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penggunaan kuesioner ditujukan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Susunan ringkas kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu: (a) menjelaskan informasi dan data pribadi/profile responden; (b) menjelaskan ukuran pertanyaan menggunakan Skala Likert.

### Teknik Analisis Data

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan keadaan lapangan secara deskriptif dengan menginterpretasikan hasil tabulasi data. Analisis deskriptif ini diharapkan dapat mendukung hasil analisis penelitian, sehingga dapat menggambarkan secara lebih rinci mengenai hasil temuan penelitian. Selain itu analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan teknologi informasi.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Uji Normalitas

**Tabel**  
**Hasil Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.12827402
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.059
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan kan pengolahan data pada Tabel diperoleh nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,200. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*) dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas pada model regresi penulis menggunakan cara dengan melihat nilai *tolerancedan VIF (Variance Inflation Factor)*. Nilai yang direkomendasikan untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* harus  $> 0,10$  dan nilai *VIF*  $< 10$ .

**Tabel**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,932	1,933		1,517	,133		
	x1	,539	,089	,555	6,057	,000	,275	3,636
	x2	,353	,088	,367	4,005	,000	,275	3,636

a. Dependent Variable: y

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSSv.22.0

Dari hasil uji multikolinieritas diatas maka diperoleh nilai *tolerance* untuk variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bimbingan Teknis Keuangan sama-sama sebesar  $0,275 > 0,10$  dan nilai *VIF* untuk kedua variabel juga sama-sama sebesar  $3,636 < 10$  maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,260	1,095		-1,151	,253		
	sipkd	,036	,043	,142	,830	,409	,359	2,785
	bimtek	,016	,040	,070	,408	,684	,359	2,785

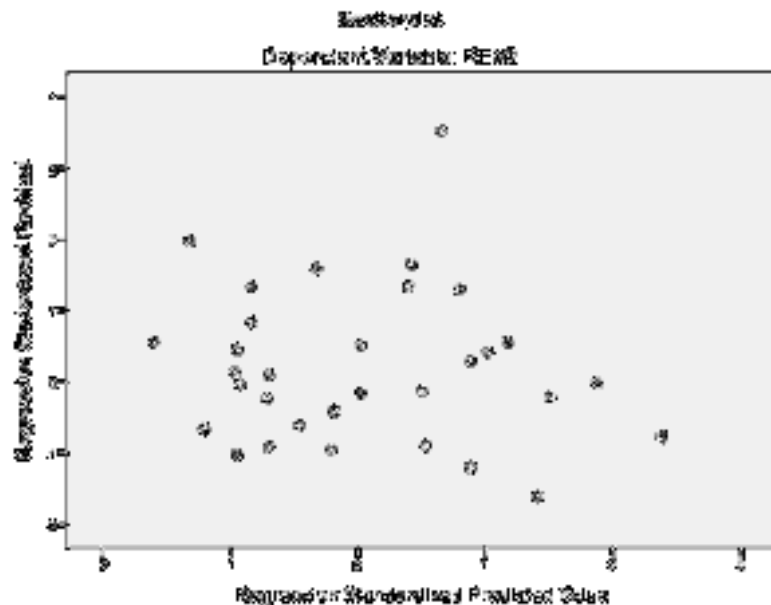
a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSSv.22.0

Dari hasil uji Glejser di atas maka diperoleh nilai signifikansi (Sig.) untuk variable Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar  $0,409 > 0,05$  dan variable Bimbingan Teknis Keuangan sebesar  $0,684 > 0,05$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gambar  
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSSv.22.0

Berdasarkan pada gambar di atas, maka uji heteroskedastisitas di hasilkan adalah tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Data penelitian dapat berupa data *time series* atau *cross section*. Untuk data cross section, akan di uji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data. Jika iya, telah terjadi autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, perlu di upayakan agar tidak terjadi autokorelasi. Penilaian ada tidaknya autokorelasi dapat di gunakan patokan nilai Durbin Watson.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson (D-W) pada perhitungan regresi dengan data statistik pada tabel Durbin-Watson ( $du < DW < 4-du$ ).

Tabel  
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.918 <sup>a</sup>	.843	.840	1,138	2,246
a. Predictors: (Constant), bimtek, sipkd					
b. Dependent Variable: kualitas lk					

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSSv.22.0

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai hitung Durbin-Watson yang dihasilkan model regresi sebesar 2.246. Sedangkan dalam tabel Durbin-Watson pada tingkat signifikan 5%, jumlah sampel 94 (n) dan jumlah variabel independent (k=2) akan didapat nilai batas atas (du) sebesar 1.7078 dan batas bawah (dL) sebesar 1.6211.

Oleh karena nilai DW lebih besar dari batas atas (du) yaitu sebesar 1.7078 dan kurang dari  $4 - 1.7078 = 2.2922$  (4-du). Sehingga  $du < dw < (4-du)$ ;  $1.7078 < 2.246 < 2.2922$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi pada model penelitian ini.

### Hasil Uji Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan bimbingan teknis keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Lebak dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

**Tabel**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,711	1,817		,942	,349		
	sipkd	,213	,071	,207	2,993	,004	,359	2,785
	bimtek	,715	,067	,744	10,739	,000	,359	2,785

a. Dependent Variable: kualitas lk

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSSv.22.0

Model regresi yang terbentuk berdasarkan tabel 4.43 adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,711 + 0,213X_1 + 0,715X_2$$

Dimana :

- Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
 X<sub>1</sub> : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  
 X<sub>2</sub> : Bimbingan Teknis Keuangan

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda, masing-masing variabel menjelaskan bahwa:

1. Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 1,711, artinya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X<sub>1</sub>) dan bimbingan teknis keuangan (X<sub>2</sub>) dianggap konstan maka tingkat kualitas laporan keuangan daerah konstan sebesar 1,711.
2. Koefisien regresi variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X<sub>1</sub>) sebesar 0,213 artinya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,213 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Koefisien regresi variabel bimbingan teknis keuangan (X<sub>2</sub>) sebesar 0,715 artinya bimbingan teknis keuangan mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,715 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menunjukkan berapa persen dan variasi (naik turunnya) variabel dependent dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variasi variabel independent. Koefisien determinasi merupakan dari koefisien korelasi dan dinyatakan dalam bentuk persen.

**Tabel**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.918 <sup>a</sup>	.843	.840	1.138

a. Predictors: (Constant), bimtek, sipkd

b. Dependent Variable: kualitas lk

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSSv.22.0

Berdasarkan pada hasil output di atas didapatkan nilai koefisien korelasi antara faktor Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dan Bimbingan Teknis Keuangan ( $X_2$ ) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara bersamaan sebesar 0,918. Untuk mengetahui besarnya hubungan  $X_1$  dan  $X_2$  dengan Y secara bersamaan yang digunakan dalam presentase dapat diketahui melalui koefisien determinasi. Selanjutnya digunakan perhitungan koefisien determinasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Kd &= R^2 \times 100\% \\ &= 0,843 \times 100\% \\ &= 84,3\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) adjusted sebesar 0,840. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan bimbingan teknis keuangan mempengaruhi 84% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi ini menunjukkan tingkat hubungan variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y sebesar 84% dan sisanya 16% di pengaruhi oleh faktor atau variabel lain.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Hasil Uji Partial (Uji t)

**Tabel**  
**Hasil Uji Partial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,711	1,817		,942	,349		
	sipkd	,213	,071	,207	2,993	,004	,359	2,785
	bimtek	,715	,067	,744	10,739	,000	,359	2,785

a. Dependent Variable: kualitas lk

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSSv.22.0

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen sebagai berikut :

1. Nilai thitung variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperoleh sebesar 2,993 dan signifikan 0,004 lebih besar dari t tabel 1,9861, maka hipotesis (H1) yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ .
2. Nilai thitung variabel bimbingan teknis keuangan diperoleh sebesar 10,739 lebih besar dari ttabel 1,9861 dan signifikan 0,000, maka hipotesis (H2) yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa bimbingan teknis keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ .

### Hasil Uji Regresi Simultan (Uji F)

**Tabel**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	633.476	2	316.738	244.765	.000 <sup>b</sup>
	Residual	117.758	91	1.294		
	Total	751.234	93			

a. Dependent Variable: kualitas lk

b. Predictors: (Constant), bimtek, sipkd

*Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSSv.22.0*

Berdasarkan tabel nilai Fhitung 244,765 lebih besar dari Ftabel 3,10 dan signifikan 0,000 maka hipotesis (H3) yang diajukan diterima. Hal ini berarti semua variabel independen (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan bimbingan teknis keuangan) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak) pada taraf signifikan = 5%.

### Pembahasan

Dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan bimbingan teknis keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Hasil pengujian dengan analisis SPSS versi 22.0 dapat diketahui Nilai thitung variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperoleh sebesar 2,993 dan signifikan 0,004 lebih besar dari t tabel 1,986. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mahlida (2017) menemukan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah sistem yang dibuat untuk mengolah data, termasuk menyusun, menyimpan data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang cepat, konsisten, tepat dan andal. Oleh karena itu dengan menggunakan sistem, *user* sangat terbantu dalam menyajikan laporan keuangan secara lebih cepat dan tentunya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan saji atau *human error* karena sistem dapat mendeteksi perbedaan atau kesalahan yang sangat kecil sekalipun.

Bimbingan teknis keuangan menurut hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan alat analisis SPSS versi 22.0, diketahui nilai *t* hitung variabel bimbingan teknis keuangan diperoleh sebesar 10,739 lebih besar dari *t* tabel 1,9861 dan signifikan 0,000, Hal ini berarti bahwa bimbingan teknis keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Penelitian ini relevan dengan penelitian Hartati (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan teknis keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan akan tercapai mana kala pengelola keuangan yang terlibat didalamnya yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Organisasi Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan serta Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang membuat laporan keuangan sudah diikuti serta kan dalam pelatihan atau bimbingan teknis keuangan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan dan terpenuhinya kebutuhan para peserta pelatihan agar dapat melakukan pekerjaannya secara profesional dan berkompeten karena sudah dibekali dengan bimbingan teknis keuangan terlebih dahulu sehingga terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yakni andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bimbingan Teknis Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui kuesioner yang disebarkan kepada 94 responden diantaranya terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan Operator SIPKD pada Organisasi Perangkat Daerah setingkat Badan/Dinas di Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu pula dengan Bimbingan Teknis Keuangan yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak secara langsung dan signifikan.

### Daftar Pustaka

- Ambar, Teguh Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : Graha Ilmu). 2009.
- Hartati. 2016. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan Teknis Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah), Katalogis, 4, (9). Retrieved December 12, 2019, from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6772>

- Mahlida. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi informasi dalam menghasilkan Pelaporan keuangan daerah yang berkualitas (Studi Empiris pada OPD Kota Bandar Lampung dan Kota Metro). Universitas Lampung.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Putra, T. P., Chabachib, M., Haryanto, M., & Pangestuti, I. R. D. (2007). Pengaruh kinerja keuangan dan beta saham terhadap price to book value (studi pada perusahaan real estate dan property yang listed di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2004-2006). Jurnal Studi Manajemen Organisasi, 4(2), 81-90.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, H. (2018). Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbbkb) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau. Jurnal Pahlawan, 1(1), 8-14.